MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMNISTRASI
Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B-37 /Bua.3/I/2021 18 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Bundel
Hal : Percepatan Proses Restrukturisasi Rekening Pengeluaran DIPA 01

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-257/MK.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 Hal Perpanjangan Proses Restrukturisasi Rekening Pengeluaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah membuka rekening induk yang akan mengkonsolidasikan seluruh rekening bendahara pengeluaran DIPA 01;
b. Permohonan persetujuan perubahan rekening Satuan Kerja dari rekening giro menjadi rekening virtual telah diajukan ke KPPN Jakarta VI selaku KPPN Mitra Eselon I;
c. Satuan Kerja segera berkoordinasi dengan pihak Bank untuk persiapan restrukturisasi rekening tersebut;
d. Sehubungan dengan banyaknya perubahan data kuasa pengguna anggaran, bendahara, dan rekening pada Satuan Kerja tahun anggaran 2021 yang sangat diperlukan dalam proses restrukturisasi rekening tersebut, khusus Satuan Kerja yang ada perubahan kuasa pengguna anggaran, bendahara dan rekening terhitung sejak bulan Oktober 2020 segera mengirimkan data perubahan melalui link https://bit.ly/3sBRNoq paling lambat tanggal 19 Januari 2021;
e. Mengingat pentingnya data tersebut, agar tidak terjadi kesalahan penginputan data yang menyebabkan terlambatnya proses percepatan restrukturisasi rekening tersebut;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan Administrasi MA-RI,

SAHWAN, S.H., M.H.
NIP. 19680817 198903 1 007

Tembusan :
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Nomor : S-257/MK.5/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Perpanjangan Proses Restrukturisasi Rekening Pengeluaran Sesuai PMK 183/PMK.05/2019

22 Desember 2020

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga terlampir

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK terkait pengelolaan rekening pemerintah serta dalam rangka modernisasi rekening pengeluaran yang dapat memantau saldo rekening secara *real-time* dan mendorong penggunaan *digital banking* pada satuan kerja.
2. Sesuai Pasal 69 PMK 183/PMK.05/2019, diatur batas waktu pelaksanaan restrukturisasi untuk seluruh Kementerian/Lembaga selesai pada bulan Desember 2020.
3. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan restrukturisasi rekening pengeluaran tahun 2020, belum seluruh satker lingkup Kementerian/Lembaga menyelesaikan tahapan restrukturisasi terutama pada tahap migrasi saldo dari rekening giro ke rekening virtual.
4. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada terhambatnya proses penyelesaian seluruh tahapan restrukturisasi rekening pengeluaran, proses restrukturisasi rekening pengeluaran diperpanjang sebagai berikut:

No.	Tahap	Keterangan	Semula	Menjadi
1.	I	Satker lingkup Kemenkeu	Selesai	
2.	II	Satker lingkup K/L yang tidak memiliki unit vertikal	Juli 2020	Maret 2021
3.	III	Seluruh satker lingkup K/L	Desember 2020	Maret 2021

5. Berkenaan hal di atas, Kementerian/Lembaga diminta untuk segera menyelesaikan tahapan-tahapan restrukturisasi rekening pengeluaran sampai dengan proses migrasi saldo sebelum tanggal 31 Maret 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Andin Hadiyanto

Tembusan:
Menteri Keuangan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id

MENTERI KEUANGAN
REUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-257/MK.5/2020
Tanggal : 22 Desember 2020

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8. Asisten Jaksa Agung Kejaksaan RI
9. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3808388 Faksimile (021) 3500842 situs www.kemenkeu.go.id

27. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
28. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
31. Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
39. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
42. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
43. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
45. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
46. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
51. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
52. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
54. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

57. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
68. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
69. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
76. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80. Wakil Sekretaris Kabinet RI
81. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
82. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila